

ANALISIS UKURAN KOTA OPTIMAL DI KOTA PADANG

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**



Oleh:

VANNY RIDWAN
NIM: 13641/2009

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

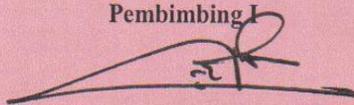
ANALISIS UKURAN KOTA OPTIMAL DI KOTA PADANG

Nama : Vanny Ridwan
BP/NIM : 2009/13641
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2014

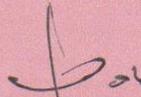
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP. 19590805 198503 1 006

Pembimbing II

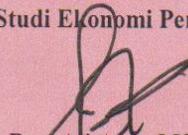


Novva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Diketahui Oleh :

Ketua

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

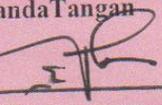
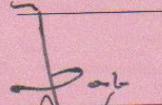
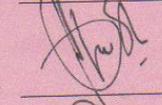
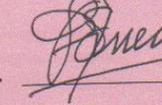
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS UKURAN KOTA OPTIMAL DI KOTA PADANG

Nama : Vanny Ridwan
Nim/Bp : 13641/2009
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2014

Tim Penguji :

NO	Jabatan	Nama	TandaTangan
1.	Ketua	: Drs. Zul Azhar, M.Si	1. 
2.	Sekretaris	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Doni Satria, SE, M.SE	3. 
4.	Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanny Ridwan
Nim/ Tahun Masuk : 13641/2009
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 18 Juni 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Dobi II No 33 Padang
No. HP/telp. : 082172127239
Judul Skripsi : Analisis Ukuran Kota Optimal Di Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2014
Yang Menyatakan



Vanny Ridwan
Vanny Ridwan
Nim/Bp. 13641/2009

ABSTRAK

Vanny Ridwan (2009/13641) : Analisis Ukuran Kota Optimal di Kota Padang. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE. M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran optimal Kota Padang dari sudut pandang ekonomi pada tahun 2001 sampai dengan 2011.

Jenis penelitian ini deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan induktif yaitu: uji asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas), analisis regresi berganda, uji t dan uji F.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan Marginal Revenue dan pendekatan Marginal Cost, ukuran optimal Kota Padang agar pengeluaran dapat minimum dan agar pendapatan perkapita dapat meningkat pada jumlah penduduk optimal adalah sebesar 800.379 jiwa.

Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat melakukan penyebaran penduduk yang merata dan berusaha menggali potensi sumber-sumber pendapatan kota sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola kota.

Kata kunci : Marginal Cost (MC), Marginal Revenue (MR), ukuran optimal kota, penduduk optimal

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Seiring shalawat dan salam kepada nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan besar di atas permukaan bumi, sehingga kita dapat merasakan kehidupan seperti pada saat sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan yang tidak dapat di selesaikan sendiri. Namun melalui pembimbing dan staf pengajar di Fakultas ekonomi penulis dapat mencari solusi dari permasalahan yang di hadapi, sehingga pada akhirnya penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, saran, dan waktu untuk saya supaya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Doni Satria, SE, M.E dan Bapak Drs. Akhirmen, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi dan yang telah memberikan saran-saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Dosen serta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat beserta Staf yang telah membantu kelancaran bagi penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini.
6. Teristimewa penulis persembahkan buat Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta serta kakak-kakak saya (Silvia dan Lidya), yang telah memberikan kesungguhan doa, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan (cicing, ciwid, ayi, dendy, vitha, roland, juwita, vina, ari, farid, hamim, bg bob) serta teman-teman R dan NR angkatan 2009.
8. Rekan-rekan seperjuangan pada Fakultas Ekonomi khususnya, dan Universitas Negeri Padang pada umumnya.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi. Untuk itu, penulis mohon maaf dan selalu mengharapkan informasi baik saran maupun kritik dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan memberikan manfaat bagi pembaca.

Padang, April 2014

Penulis

Vanny Ridwan

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Pengertian Kota dan Fungsi Kota.....	8
2. Konsep Penduduk Kota Optimal	11
3. Sumber Penerimaan Kota	13
4. Biaya Pengelolaan Kota.....	14
B. Temuan Penelitian Sejenis	16
C. Kerangka Konseptual	16
D. Hipotesis penelitian.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Tempat dan Waktu Penelitian	19
C. Jenis dan Sumber Data	19
D. Variabel Penelitian	20

E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Definisi Operasional	20
A. Teknik Analisis Data.....	21
1. Analisis Deskriptif	22
2. Analisis Induktif.....	22
a. Uji Multikolinearitas	24
b. Uji Autokorelasi	24
c. Uji Heterokedastisitas.....	25
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	26
4. Koefisien Determinasi (R^2).....	27
5. Pengujian Hipotesis.....	28
a. Uji t.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	30
a. Keadaan Geografis Kota Padang	30
b. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang.....	33
c. Keadaan Penduduk Kota Padang	34
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	35
a. Ukuran Optimal Kota Padang	35
b. Deskripsi Peandapatan Kota Padang.....	39
c. Deskripsi Pembiayaan Kota Padang	41
d. Deskripsi Infrastruktur Kota Padang.....	44
3. Analisis Induktif	47
a. Uji Asumsi Klasik	49
b. Analisis Linear Berganda	54
c. Koefisien Determinasi R^2	57
d. Pengujian Hipotesis	58

2. Pembahasan	60
1. Jumlah penduduk Kota Padang dari sisi pengeluaran pemerintah (Pendekatan Marginal cost).....	61
2. Jumlah penduduk Kota Padang dari sisi pendapatan (Pendekatan Marginal revenue)	63
3. Ukuran Optimal Kota Padang	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2001 sampai dengan 2011.....	3
2. Tabel PDRB Perkapita Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001 sampai dengan 2011.....	4
3. Tabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2001 sampai dengan 2011.....	5
4. Tabel Ibu Kota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan tahun 2010.....	33
5. Tabel Kepadatan Penduduk Kota Padang Menurut Kecamatan Tahun 2011...	36
6. Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Pada Periode Tertentu Menurut Kecamatan.....	37
7. Tabel PDRB Perkapita Menurut Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2007 sampai dengan 2010.....	40
8. Tabel Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja Tahun 2006 sampai dengan 2010 kota padang.....	42
9. Tabel Produksi, Pemakaian Dan Distribusi Air PDAM Di Kota Padang.....	44
10. Tabel Jumlah Pelanggan PT. PLN Cabang Padang Per Golongan Tariff Daya Tahun 2010.....	46
11. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas.....	48-49
12. Tabel uji autokorelasi.....	50
13. Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Metode Breusch-Pagan Test....	51-52
14. Tabel Hasil Estimasi Persamaan Linear Berganda.....	53-54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1	
Data Mentah	73
Lampiran 2	
Hasil regresi linear berganda pendekatan marginal revenue.....	75
Hasil uji multikolinearitas	76
Hasil uji heterokedastisitas.....	77
Hasil regresi linear berganda pendekatan marginal cost.....	78
Hasil uji multikolinearitas	79
Hasil uji heterokedastisitas.....	80
Lampiran 3	
Tabel T	81
Tabel F	84
Lampiran 4	
Tabel Durbin Watson	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkotaan sebagai kawasan yang paling dinamis merupakan denyut nadi perkembangan wilayah serta memiliki kecenderungan untuk menjadi besar dan berkembang dengan dukungan wilayah sekitarnya. Perkembangan suatu kota sangat dipengaruhi oleh aktifitas ekonomi dan kebijaksanaan wilayah yang bersangkutan, baik dalam bentuk skala mikro maupun skala makro. Kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintah, perusahaan, sosial, jasa dan sebagainya. Pengembangan pembangunan kota dipengaruhi oleh banyak faktor seperti; penduduk, keadaan alam, geografis, keadaan iklim, kebudayaan, sosial, budaya, politik, ekonomi, keuangan dan lain-lain.

Apabila ukuran suatu kota terlalu besar dilihat dari jumlah penduduknya atau terlalu kecil akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi kota tersebut. Ukuran kota yang terlalu besar akan menciptakan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemacetan, polusi, harga tanah tinggi, pengangguran bertambah, lapangan pekerjaan yang semakin sulit dan meningkatnya daerah kumuh. Sebaliknya apabila ukuran kota terlalu kecil akan menimbulkan permasalahan kelangkaan sumber daya, kesulitan beradaptasi terhadap adanya perubahan struktural, sedikitnya peluang-peluang ekonomi dan sosial yang tersedia, meningkatnya ketergantungan terhadap wilayah lain dan rendahnya kemampuan untuk berkembang

sendiri, serta meningkat biaya pembangunan infrastruktur dan biaya perkapita akan menjadi tinggi.

Suatu kota merupakan suatu bidang kajian yang sangat menarik, karena kompleksitas permasalahan yang dimilikinya. Dua faktor utama dikenal sebagai determinan sifat dinamika kehidupan kota yang sangat tinggi yaitu faktor kependudukan dan faktor kegiatan penduduk. Bertambahnya kegiatan penduduk di kota yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk maupun tuntutan kehidupan masyarakat, telah mengakibatkan meningkatnya volume dan frekuensi kegiatan penduduk. Ukuran kota sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, dan biaya yang harus dikeluarkan kota.

Adam Smith (dikutip oleh Santosa dan Rahayu, 2005) Menjelaskan bahwa, dengan didukung bukti empiris, pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan
di Kota Padang Tahun 2001-2011

Kecamatan	Tahun										
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bungus Teluk Kabung	20.181	20.227	22.164	22.717	23.197	23.400	23.592	24.116	24.417	22.896	23.142
Lubuk Kilangan	38.518	39.882	38.734	39.700	40.538	41.560	42.585	43.531	44.552	48.850	49.751
Lubuk Begalung	84.372	86.055	93.203	95.539	97.560	100.912	104.323	106.641	109.793	106.432	108.018
Padang Selatan	55.651	56.295	57.342	58.780	60.022	61.003	61.967	63.345	64.458	57.718	57.386
Padang Timur	81.613	83.038	79.413	81.427	83.151	84.231	85.279	87.174	88.510	77.868	77.932
Padang Barat	60.886	61.693	56.980	58.420	59.657	59.895	60.102	61.437	62.010	45.380	46.060
Padang Utara	67.388	68.896	69.479	71.256	72.766	73.730	74.667	76.326	77.509	69.119	69.275
Nanggalo	51.910	52.674	53.171	54.516	55.669	56.604	57.523	58.801	59.851	57.275	57.731
Kuranji	97.494	99.292	105.370	108.029	110.316	113.976	117.694	120.309	123.771	126.729	128.835
Pauh	41.215	42.188	47.956	49.163	50.204	51.354	52.502	53.669	54.846	59.216	60.553
Koto Tengah	121.555	124.181	141.638	145.193	148.264	153.075	157.956	161.466	166.033	162.079	165.633
Jumlah	720.783	734.421	765.450	784.740	148.264	819.740	838.190	856.815	875.750	833.562	844.316

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka (data diolah) tahun 2012

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan penyebaran jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Padang dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan jumlah 720.783 jiwa di tahun 2001 dan 844.316 jiwa di tahun 2011. Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung pada tahun 2001 sebanyak 20.181 jiwa dan pada tahun 2011 sebanyak 23.142 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Koto Tengah, pada tahun 2001 sebanyak 121.555 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 165.633 jiwa. Hal ini kemungkinan terjadi karena ketidakmerataan distribusi penyebaran penduduk di Kota Padang diperkirakan akibat tidak meratanya

kebijaksanaan penyebaran pusat-pusat pertumbuhan dan pemukiman penduduk menurut kecamatan selama ini.

Sehubungan dengan tidak meratanya distribusi penyebaran penduduk menurut kecamatan di Kota Padang akan membawa pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dapat dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka secara kuantitatif dapat dikatakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah dapat diketahui dari PDRB perkapita. Secara teoritis pendapatan kota merupakan gambaran dari perkembangan kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkat tingkat pendapatan menunjukkan membaiknya perekonomian masyarakat.

Tabel 1.2
PDRB Perkapita Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2001-2011 (Ribu rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita (ribu rupiah)
2001	11.064.368,25
2002	12.605.628,83
2003	13.722.346,91
2004	15.329.014,89
2005	16.566.075,85
2006	18.661.359,28
2007	20.722.251,42
2008	23.487.008,95
2009	26.555.905,67
2010	29.495.545,83
2011	32.496.376,32

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka (data diolah) tahun 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 memperlihatkan perekonomian Kota Padang masih mengalami peningkatan. Ini ditandai dengan tingkat

pertumbuhan PDRB perkapita Kota Padang mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun. Terlihat pada tahun 2001 jumlah PDRB perkapita Kota Padang sebesar Rp 11.064.368,25 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar Rp 32.496.376,32. Hal ini kemungkinan terjadi karena peningkatan produktifitas masyarakat Kota Padang. Sehingga lambat laun kesejahteraanpun akan terus meningkat, dengan asumsi perekonomian terus menunjukkan angka yang positif.

Santosa dan Rahayu (2005) mengatakan, peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting.

Tabel 1.3
Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kota Padang Tahun 2001-2011 (Ribu rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (Ribu rupiah)
2001	277.603.145,00
2002	346.762.372,00
2003	399.857.769
2004	430.109.762
2005	465.215.319.213
2006	710.983.680
2007	904.516.386
2008	1.060.721.657
2009	1.114.373.740
2010	1.147.368.030
2011	1.220.579972

Sumber: BPS Kota Padang (data diolah) tahun 2012

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa belanja daerah pemerintah Kota Padang terus mengalami peningkatan. Di tahun 2001 belanja daerah sebesar Rp.277.603.145,00 terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2011 sebesar Rp.1.220.579.972.

Berdasarkan hal itu penulis ingin memfokuskan wilayah penelitian untuk Kota Padang. Dari informasi ini bagaimana pemerintah Kota Padang dapat menggali sumber-sumber ekonomi yang mungkin dapat diperoleh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan Fenomena yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Ukuran Kota Optimal di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan adalah: Berapa ukuran optimal Kota Padang dari sudut pandang ekonomi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ukuran optimal Kota Padang dari sudut pandang ekonomi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai bahan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu terutama ilmu perkotaan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan peneliti.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan implikasi kebijakan berdasarkan penelitian empiris atas fenomena yang ada bagi pembuat kebijakan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

5. Pengertian Kota dan Fungsi Kota

Dalam pengertian geografis, kota itu adalah suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok kelompok, dan mata pencaharian penduduknya bukan pertanian. Sementara menurut Bintarto, 1987, kota dalam tinjauan geografi adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah di belakangnya. Tinjauan di atas masih sangat kabur dalam arti akan sulit untuk menarik batas yang tegas untuk mendefinisi kota dan membedakannya dari wilayah desa apabila menginginkan tinjauan tersebut.

Menurut Richardson dalam (Azhar:1998) apabila ukuran kota terlalu besar dilihat dari jumlah penduduknya atau terlalu kecil akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi kota tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk suatu kota tidak seimbang dengan penambahan pendapatan kota secara perkapita, akan mendatangkan berbagai dampak negatif.

Menurut Jhingan (2012:406) yang menyatakan pengaruh pertumbuhan penduduk pada pendapatan perkapita biasanya tidak

menguntungkan. Pertumbuhan penduduk cenderung memperlambat pendapatan perkapita.

Menurut Branch (1997) mengatakan bahwa ekonomi kota yang sehat meningkatkan reputasi kota secara keseluruhan, menarik bagi pertumbuhan industri dan modernisasi, cenderung menarik bagi kegiatan usaha yang baru, mendorong pertumbuhan penduduk, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan penilaian secara finansial oleh banyak lembaga.

Adapun fungsi dasar suatu kota, menurut ekonomi adalah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup melalui produksi barang-barang dan jasa-jasa, untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri. Ekonomi perkotaan menurut Branch (1996) dapat ditinjau dari tiga bagian:

- a. Ekonomi pemerintah, meliputi pelaksanaan pemerintahan kota sebagaimana terlihat pada anggaran pendapatan dan belanja departemen –departemen yang melaksanakannya secara reguler, distrik sekolah dan distrik-distrik khusus yang ditetapkan untuk tujuan-tujuan tertentu.
- b. Ekonomi swasta, terdiri atas berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, mulai dari perusahaan industri dan komersial yang besar hingga kegiatan usaha independen.
- c. Ekonomi khusus, terdiri dari bermacam-macam organisasi nirlaba, organisasi yang bekerja secara sukarela, organisasi yang dibebaskan dari pajak, yang semuanya bukan diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah.

Berdasarkan www.klasifikasikotaberdasarkanjumlahpenduduk.com

seperti halnya desa, kota juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Untuk membedakannya, kota diklasifikasikan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jumlah penduduk, kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Megapolitan, yaitu kota yang berpendudukan di atas 5 juta orang,
 - 2) Metropolitan (kota raya), yaitu kota yang berpenduduk antara 1-5 juta orang,
 - 3) Kota besar, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000- 1 juta orang,
 - 4) Kota sedang, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 100.000-500.000 orang,
 - 5) Kota kecil, yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000-100.000 orang.

- b. Berdasarkan tingkat perkembangannya, kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Tingkat eopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru,
 - 2) Tingkat polis, yaitu suatu kota yang masih memiliki sifat agraris,
 - 3) Tingkat metropolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga jalur perkotaan yang sangat besar,
 - 4) Tingkat tryanopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial, seperti kemacetan lalu lintas, dan tingkat tingkat kriminalitas yang tinggi,
 - 5) Tingkat necropolis, yaitu suatu kota yang berkembang menuju keruntuhan.

- c. Berdasarkan fungsinya, kota diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Kota pusat produksi, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik berupa bahan mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi,
 - 2) Kota pusat perdagangan (*centre of trade and commerce*) yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional,
 - 3) Kota pusat pemerintahan (*political capital*), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota negara.
 - 4) Kota pusat kebudayaan (*cultural centre*), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan.

6. Konsep Ukuran Kota Optimal

Optimasi merupakan pendekatan normatif dengan mengidentifikasi penyelesaian terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan. Menurut Sjafrizal (2012), untuk mengukur ukuran optimal suatu kota dapat dilakukan dengan pendekatan *Marginal Cost* (MC) dan *Marginal Revenue* (MR), merupakan hubungan antara pertumbuhan penduduk perkotaan dengan keuntungan marginal yang dapat diperoleh dengan biaya marginal yang diakibatkan.

Dalam pendekatan ini kota dikatakan optimal apabila jumlah penduduk kota pada saat peningkatan biaya pengelolaan kota adalah sama dengan peningkatan pendapatan kota. Menurut Samuelson dan William (2003) secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Marginal Cost (MC)

$$MC = \frac{\partial TC}{\partial Q} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana:

MC = Memperlihatkan *Marginal Cost*

TC = pengeluaran kota

Q = jumlah penduduk

Persamaan (2.1) diasumsikan hubungan antara biaya marginal terhadap perbandingan perubahan biaya pengelolaan kota dengan perubahan jumlah penduduk kota.

b. Fungsi Marginal Revenue (MR)

$$MR = \frac{\partial TR}{\partial Q} \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana :

MR = Memperlihatkan *Marginal Revenue*

TR = Pendapatan kota

Q = Jumlah penduduk

Persamaan (2.2) memperlihatkan hubungan antara *marginal revenue* dengan pendapatan kota dan jumlah penduduk.

Untuk menentukan ukuran optimal Kota Padang, penulis menggunakan pendekatan *Marginal Cost* (MC) dan *Marginal Revenue* (MR). Rumus matematik untuk melihat kondisi ekuilibrium menentukan ukuran kota optimal, dapat ditulis sebagai berikut:

$$MR = MC \dots\dots\dots(2.3)$$

Persamaan (2.3) menjelaskan bahwa jumlah penduduk suatu kota dikatakan optimal dapat dicari dengan menyamakan *Marginal Cost* (MC) dengan *Marginal Revenue* (MR).

Dalam pembahasan ini perubahan pengeluaran dan pendapatan suatu kota akibat perubahan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kota tersebut. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini, maka penduduk optimal bagi suatu kota adalah pada saat memaksimalkan pendapatan perkapita masyarakat dan meminimumkan biaya pengelolaan kota.

7. Sumber Penerimaan Kota

Maju mundurnya suatu kota sangat ditentukan oleh aktifitas ekonomi perkotaan, baik dalam skala mikro maupun skala makro. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dapat dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai jumlah keseluruhan nilai tambah produksi barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian suatu daerah di dalam masa satu tahun. Keberhasilan pembangunan regional secara makro dapat diukur dari peningkatan PDRB. Apabila dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka secara kuantitatif dapat dikatakan tingkat kemakmuran dari suatu daerah dapat diketahui dari PDRB perkapita.

Secara ekonomi kota akan berkembang jika penerimaan kota lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkannya. Sebaliknya apabila kota mempunyai pendapatan perkapita rendah, maka bantuan pemerintah sangat diharapkan (Sjafrizal, 1995). Jika pendapatan suatu kota rendah dan biaya yang harus dikeluarkan secara perkapita besar, maka hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan kota (Allonso, 1971).

Menurut Soedjito bahwa semakin besar keuangan daerah, semakin besar pulalah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Menurut D.J. Mamesah keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1957 disebutkan bahwa penerimaan kota Daerah Tingkat II dapat berupa: retribusi yang dapat dipungut daerah adalah uang toll, ijin bangunan, retribusi pemakaian tanah, retribusi pengerukkan kakus, retribusi pemberian ijin perusahaan, ijin kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, stasiun bis, balai pengobatan, tempat rekreasi, retribusi pasar dan lain-lain. Hendaknya disadari bahwa pengembangan kota sama dengan pembangunan nasional dalam ruang lingkup yang lebih mikro.

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan kota yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi akan memperbesar permintaan atas barang-barang.

8. Biaya Pengelolaan Kota

Menurut Johan Bastian dan Wahyu Hidayat (1992), dalam (Rukman:1993), sistem pembiayaan pemerintah daerah serta pembangunan wilayah dan perkotaan di Indonesia belum pernah mengalami perubahan yang berarti selama beberapa puluh tahun.

Menurut Reksohadiprojo (1985) segala pengeluaran untuk pelayanan masyarakat (*public service*) seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, polisi, pemadam kebakaran, angkutan kota, air minum, sanitasi, pengawasan lingkungan, pemukiman, dan lain-lain tidak selalu tergantung pada *dropping* dari pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah hendaknya mampu mencari sumber-sumber dana yang digunakan untuk biaya pengelolaan pembangunan kota.

Menurut Bastian (1993), mengatakan bahwa masalah-masalah dalam pembiayaan prasarana dan pelayanan kota sumber dananya adalah: pertama, penyaluran dana dari pusat ke daerah, termasuk hibah untuk belanja pembangunan dan rutin, dan pendapatan pusat yang diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada pemerintah daerah; kedua, PAD atau Pendapatan Asli Daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah; dan ketiga, pinjaman pemerintah daerah. Hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara garis besar dibagi menjadi pembiayaan untuk pengeluaran rutin dan untuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Iwan Jaya Aziz (1994) menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor penentu besarnya pengeluaran pemerintah diantaranya faktor penduduk, bertambahnya jumlah penduduk menjadi pertimbangan pengalokasian dana dalam jumlah tertentu untuk melayani kebutuhan dan tambahan jumlah penduduk tersebut. Dengan kata lain jumlah dan pertumbuhan penduduk perkotaan cukup besar maka semakin meningkat

jumlah penduduk akan semakin besar kebutuhan akan pelayanan jasa-jasa publik.

Pembiayaan pembangunan baik untuk sarana maupun prasarana perkotaan yang berupa fasilitas umum maupun yang lainnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk kota. Akan tetapi penambahan jumlah penduduk suatu kota belum tentu akan menambah beban bagi kota, karena ada indikator-indikator yang mempengaruhinya yaitu berupa peningkatan pendapatan perkapita kota.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Azhar (1998), dalam penelitiannya yang berjudul analisis ukuran kota optimal (suatu strategi dalam perencanaan pengembangan kotamadya bukittinggi) didapatkan hasil bahwa ukuran kotamadya bukittinggi belum optimal. Terdapat pengaruh signifikan antara penambahan penduduk terhadap peningkatan biaya pengelolaan kota perkapita Kotamadya Bukittinggi.

C. Kerangka Konseptual

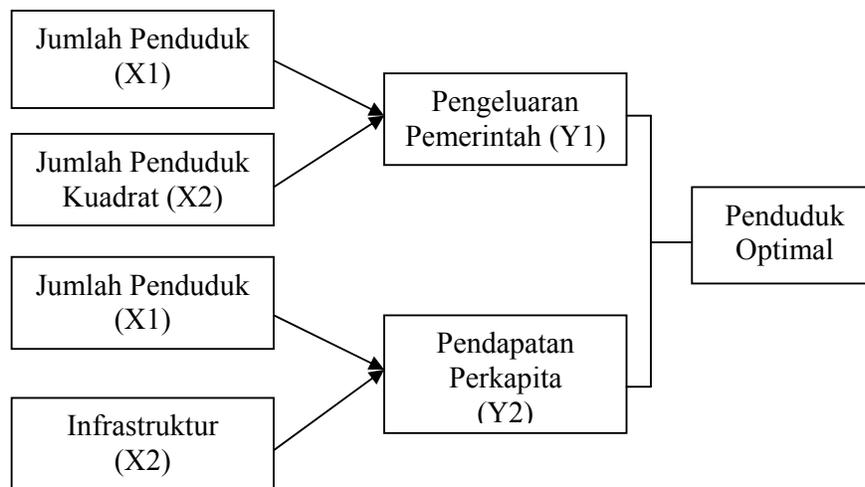
Kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan konsep untuk menjelaskan serta menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antar variabel-variabel yang diteliti berpijak dari teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Pemikiran tentang ukuran kota optimal telah lama menjadi perhatian bagi para ahli ekonom, tetapi perbedaan dan potensi masing-masing kota, maka penentuan kota dengan ukuran optimal sulit dilakukan. Jumlah

penduduk suatu kota menggambarkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan suatu kota. Kota mempunyai ukuran penduduk optimal, kota yang melewati ukuran optimal akan mendatangkan berbagai dampak negatifnya, antara lain: pengangguran tinggi, timbul kemiskinan, harga tanah sangat tinggi, terjadi daerah kumuh, kriminalitas meningkat, kemacetan lalu lintas, dan lingkungan hidup kurang baik.

Sebaliknya bila penduduk kota sedikit juga menjadi masalah. Hendaknya penambahan penduduk suatu kota dapat meningkatkan pendapatan perkapita kota, sehingga kota dapat menimumkan biaya dalam pengelolaan kota perkapita.

Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.8. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Marginal Cost (MC)

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Padang.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

Jumlah penduduk kuadrat berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Kota Padang.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

2. Pendekatan Marginal Revenue (MR)

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita di Kota Padang.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita di Kota Padang.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian menunjukkan hasil pendekatan Marginal Revenue (MR) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan perkapita di Kota Padang. Artinya jumlah penduduk yang bertambah mempengaruhi pendapatan perkapita di Kota Padang.
2. Penelitian menunjukkan hasil pendekatan Marginal Cost (MC) bahwa jumlah penduduk berdampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Sedangkan jumlah penduduk kuadrat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kota Padang. Hasil ini menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada pengeluaran pemerintah akan mengalami peningkatan.
3. Temuan penelitian berdasarkan pendekatan Marginal Revenue dan Marginal Cost (MR) ukuran Kota Padang sudah optimal. Dimana diperoleh hasil ukuran penduduk optimal sebesar 800.379 jiwa. Dengan kondisi penduduk Kota Padang tahun 2011 sebanyak 844.316 jiwa. Ternyata jumlah penduduk saat ini jauh lebih tinggi dari ukuran kota optimal.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk permasalahan kependudukan, kebijakan distribusi penyebaran penduduk Kota Padang secara merata di kecamatan. Diharapkan pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan penyebaran pemukiman baru sehingga mempercepat pemerataan penduduk, mendorong tumbuh pusat-pusat pertumbuhan baru pada lokasi yang berpenduduk kurang padat agar dapat menarik penduduk untuk tersebar dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata ruang supaya mendorong penduduk mudah tersebar dan memperlancar aktivitas para pelaku ekonomi.
2. Pengendalian biaya, kebijaksanaan pengendalian biaya pengelolaan kota, melalui perencanaan pemakaian biaya yang telah diterapkan. Kebijakan untuk meminimumkan biaya tanpa mengurangi nilai yang diberikannya. Pemadatan penduduk di daerah pengembangan dapat menekan biaya yang dikeluarkan kota.
3. Dilihat dari sisi pendapatan daerah, kebijaksanaan meningkatkan pendapatan perkapita dapat dibantu melalui kebijaksanaan distribusi penyebaran penduduk yang merata di setiap kecamatan. Aktivitas ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan harus tersebar disemua lokasi sesuai dengan

distribusi penyebaran penduduk pada memungkinkan tergalinya sumber-sumber pendapatan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2004. Statistik 1. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Alonso, W., (1971). The Economics of Urban Size, Paper Regional Science Association.
- Bintarto, R. (1984). Urbanisasi dan permasalahannya, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Branch, M. (1996), Perencanaan Kota (komperhensif: Pengantar dan Penjelasan). Gajahmada Universitas Press, Yogyakarta.
- <http://www.scribd.com/doc/46520977/penentuan> lokasi optimal tanggal 23 September 2012 Pukul 13.20 WIB
- <http://pengembanganperkotaan.wordpress.com/2011/11/09/teori-teori-perkembangan-kota/> tanggal 19 April 2013 pukul 08.45 WIB
- <http://prayudho.wordpress.com/2009/11/05/teori-lokasi/> 19 April 2013 pukul 08.45 WIB
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kota> 19 April 2013 pukul 08.45 WIB
- <http://utubuin.blogspot.com/2010/04/teori-perancangan-kota.html> 19 April 2013 pukul 08.45 WIB
- Jhingan, ML.(2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Richardson, H. (1973). The Economics of Urban Size, Saxon, House Lexington Books.